

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Puan Maharani, sebagai cucu Soekarno dan anak Megawati Soekarnoputri, telah mendapatkan sorotan publik karena tindakannya mematikan mikrofon anggota DPR saat rapat paripurna. Ini bukan kali pertama Puan melakukan tindakan tersebut, yang telah memicu perdebatan di masyarakat.

Puan Maharani terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipimpin oleh ibunya. Sebagai anggota PDIP, Puan telah menjabat dalam beberapa posisi penting, termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di pemerintahan Jokowi-JK pada 2014-2019.

Pada tahun 2019, Puan Maharani terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2019-2024. Jabatannya sebagai Ketua DPR RI memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses legislatif di Indonesia.

Namun, tindakan Puan mematikan mikrofon anggota DPR telah memicu perdebatan publik. Beberapa melihatnya sebagai kurang etis karena Puan seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada anggota DPR untuk menyampaikan pandangan mereka.

Pada Oktober 2021, Puan mematikan mikrofon anggota DPR Irwan Fenchu saat rapat pengesahan UU Cipta Kerja. Tindakan ini memicu kritikan publik terhadap Puan, meskipun beberapa orang membela tindakannya sebagai tugas dan kewajiban sebagai pemimpin sidang.

Kejadian serupa terulang pada November 2021, saat Puan memimpin rapat persetujuan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Pada kesempatan itu, anggota DPR Fahmi Alaydroes dari Fraksi PKS mengajukan interupsi, namun Puan kembali mematikan mikrofon dan menutup rapat.

Insiden lain terjadi pada Mei 2022, saat Puan memimpin rapat paripurna DPR. Anggota DPR Amien AK meminta waktu untuk berbicara, namun Puan menolak

memberikan waktu tambahan karena rapat sudah berlangsung lama dan sudah memasuki waktu salat dzuhur.

Tindakan Puan dalam mematikan mikrofon anggota DPR telah memicu perdebatan tentang etika kepemimpinan dalam rapat paripurna. Beberapa mengkritiknya sebagai sikap otoriter dan tidak menghormati hak berbicara anggota DPR, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya untuk menjaga kedisiplinan dalam jalannya rapat.

Sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani memiliki peran penting dalam menjalankan tugas legislatif dan menjaga proses demokrasi di Indonesia. Namun, sorotan publik yang muncul akibat tindakan mematikan mikrofonnya menunjukkan pentingnya transparansi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak berbicara anggota DPR dalam proses pembuatan keputusan.

Selain sorotan yang berkaitan dengan tindakan mematikan mikrofon, Puan Maharani juga telah menarik perhatian publik karena kedekatannya dengan trah Soekarno dan perannya dalam politik Indonesia. Keterlibatannya dalam PDIP, partai yang dipimpin oleh ibunya, telah memperkuat posisinya dalam dunia politik dan memberikan kontribusi pada kebijakan dan keputusan politik di negara ini.

Sebagai cucu Soekarno, Puan juga mewarisi warisan politik yang kuat dan memiliki ekspektasi publik yang tinggi. Namun, dengan sorotan yang terjadi atas tindakan mematikan mikrofonnya, Puan Maharani dihadapkan pada tantangan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua DPR RI.

Melalui perdebatan yang muncul dari tindakan mematikan mikrofon ini, penting bagi publik dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan perlunya menghormati hak berbicara dan memberikan ruang bagi semua anggota DPR untuk menyampaikan pendapat mereka secara adil dan transparan.

Kontroversi ini juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas publik, terutama bagi pemimpin yang memiliki pengaruh besar seperti Puan Maharani.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR RI, Puan perlu mempertimbangkan implikasi dari tindakan-tindakan yang ia lakukan terhadap citra institusi dan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, perlu juga adanya refleksi dan evaluasi terhadap peraturan dan mekanisme yang mengatur jalannya rapat paripurna, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi anggota DPR untuk menyampaikan pandangan mereka secara efektif.

Dalam konteks yang lebih luas, tindakan Puan Maharani dalam mematikan mikrofon dapat menjadi pembelajaran bagi semua pemimpin politik untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan menghormati hak berbicara wakil rakyat.

Puan Maharani juga perlu memahami bahwa sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung partisipasi aktif dari semua anggota DPR, tanpa adanya tindakan yang membatasi hak berbicara mereka.

Dalam konteks politik yang semakin kompleks, keterbukaan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak berbicara anggota DPR menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Perdebatan yang muncul akibat tindakan Puan Maharani dapat menjadi momentum untuk merumuskan pedoman dan mekanisme yang lebih baik dalam menjalankan rapat paripurna, sehingga semua anggota DPR dapat berpartisipasi secara efektif dan adil.

Sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, anggota memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka. Oleh karena itu, penting bagi Ketua DPR RI dan anggota lainnya untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang memfasilitasi dialog dan pengambilan keputusan yang efektif.

Melalui refleksi dan pembelajaran dari kasus ini, diharapkan tindakan serupa dalam mematikan mikrofon anggota DPR dapat dihindari di masa depan, dan proses pembuatan keputusan di DPR RI dapat berlangsung dengan lancar dan adil.

Keberadaan ketua DPR RI yang netral dan adil dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga legislatif dan memastikan proses demokrasi yang sehat di Indonesia.

Sebagai seorang pemimpin, Puan Maharani juga perlu menerima kritik dan mempertimbangkan dampak dari tindakan-tindakannya terhadap citra dan integritas lembaga yang ia pimpin. Dalam membangun negara yang demokratis, penting bagi semua pihak, termasuk pemimpin politik, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Peran Ketua DPR RI membutuhkan kebijaksanaan, integritas, dan keterbukaan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili dengan baik dan bahwa demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia.

Sosok Ketua DPR Puan Maharani menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Pengguna Twitter aktif membahasnya dengan menggunakan tagar Puan Maharani yang telah digunakan lebih dari 40 ribu kali sejak RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law disahkan menjadi UU.

Mayoritas perbincangan tentang politisi dari PDI Perjuangan ini terkait dengan insiden mematikan mikrofon Benny K. Harman, politisi Partai Demokrat, saat melakukan interupsi dalam sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Beberapa akun di Twitter, seperti @idadaniasih1, menyoroti pengalaman hidup Puan dan mempertanyakan hati nuraninya, dengan menyinggung bahwa Puan belum pernah merasakan menjadi buruh pabrik yang bekerja dalam kondisi berdiri sepanjang hari.

Akun @jenochan14_ membuat meme yang menunjukkan tiga tokoh kartun menuding Puan sebagai pelaku mematikan mikrofon selama sidang paripurna.

Seorang pengguna Twitter dengan akun @imtheredtower mengaku pernah menjadi soundman dan mengelakar bahwa Puan memiliki potensi untuk menjadi Front of House (FOH) dalam acara musik Djakarta Warehouse Project karena keahliannya mematikan mikrofon.

Sebaliknya, akun @MJtuhMasJoko menggambarkan situasi di mana Puan mematikan mikrofon dalam rapat Zoom, padahal orang tersebut baru bicara selama dua menit.

Banyak pengguna Twitter yang mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap tindakan Puan dalam mematikan mikrofon anggota DPR, dengan menganggapnya tidak menghormati hak berbicara anggota yang sedang menyampaikan interupsi.

Beberapa pengguna juga melihat insiden ini sebagai contoh dari kurangnya transparansi dan partisipasi dalam proses legislatif di Indonesia.

Diskusi di Twitter mengarah pada pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan politik, terutama sebagai pemimpin sidang seperti Puan Maharani.

Seiring dengan viralnya insiden ini, diharapkan bahwa perbincangan di media sosial dapat mendorong refleksi dan perbaikan dalam proses pembuatan keputusan di DPR serta memastikan kebebasan berbicara dan partisipasi yang adil bagi semua anggota.

Beberapa pengguna Twitter juga menyuarakan kebutuhan akan pembaruan aturan dan mekanisme sidang paripurna agar lebih menghargai hak anggota DPR untuk berbicara dan berdebat.

Perdebatan ini menyoroti perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemimpin sidang dan anggota DPR agar situasi seperti ini dapat dihindari di masa depan.

Meskipun terjadi kontroversi, Puan Maharani juga mendapatkan dukungan dari beberapa pengguna Twitter yang berpendapat bahwa tindakannya mematikan

mikrofon adalah bagian dari tugasnya sebagai pimpinan sidang untuk menjaga disiplin dan ketertiban dalam rapat.

Beberapa pengguna Twitter juga menyebutkan bahwa insiden ini seharusnya tidak mendapatkan terlalu banyak perhatian, mengingat masih banyak isu yang lebih penting dan substansial yang harus ditangani oleh DPR.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menghormati pandangan dan opini yang berbeda serta memastikan bahwa kritik yang disampaikan secara terbuka tidak menimbulkan pembatasan kebebasan berbicara.

Insiden ini juga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan praktik mematikan mikrofon anggota DPR dalam sidang paripurna di masa mendatang dan apakah ada perlunya perubahan dalam peraturan sidang.

Dalam konteks politik yang kompleks dan dinamis, penting untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan transparan serta membangun budaya dialog dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Insiden ini dapat menjadi momentum bagi DPR untuk merefleksikan dan mengevaluasi praktik-praktik dalam sidang paripurna agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Pengguna Twitter juga mengingatkan bahwa perhatian publik harus tetap fokus pada substansi kebijakan yang sedang dibahas dan efeknya bagi masyarakat, bukan hanya pada insiden-insiden seperti ini.

Sikap terbuka dan tanggap terhadap kritik dari publik adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga legislatif.

Sebagai pemimpin DPR, Puan Maharani perlu mampu mengelola perbedaan pendapat dengan bijaksana dan memastikan bahwa proses pembuatan keputusan berlangsung dengan integritas dan transparansi.

Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi semua pemimpin politik tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak anggota untuk berbicara dalam sidang paripurna.

Melalui perbincangan di media sosial, diharapkan ada perubahan positif dalam praktik-praktik sidang paripurna dan hubungan antara DPR dengan masyarakat yang mereka wakili.

Ketika menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, Puan Maharani harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Kritik dan perdebatan yang muncul dari insiden ini harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas proses legislatif dan memastikan kebebasan berbicara dan partisipasi yang inklusif.

Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan politik yang sehat, di mana perbedaan pendapat bisa dihormati dan diolah menjadi langkah-langkah yang lebih baik bagi kemajuan bangsa.

Kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan politik semakin meningkat, dan diharapkan bahwa insiden ini dapat menjadi pemicu perubahan positif dalam praktik sidang paripurna di DPR.

Kritik yang disampaikan oleh masyarakat harus direspon dengan serius oleh para pemimpin politik, dan langkah-langkah konstruktif harus diambil untuk menghindari insiden serupa di masa depan.

Proses pembuatan keputusan di DPR harus berjalan dengan transparansi dan partisipasi yang adil, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks global yang terus berkembang, DPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memajukan kepentingan rakyat dan menciptakan keadilan sosial.

Insiden ini dapat menjadi titik tolak bagi DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sidang paripurna dan memastikan bahwa kebebasan berbicara dan partisipasi politik tetap menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan.

Penting bagi semua pihak untuk menjaga kesantunan dalam berdiskusi dan berdebat, serta mendorong penggunaan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pribadi dalam menyampaikan pandangan.

DPR sebagai lembaga legislatif harus memberikan contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah dan keputusannya.

Melalui refleksi dan perbaikan yang konstruktif, diharapkan kejadian ini dapat memperkuat integritas lembaga legislatif dan membangun kepercayaan publik terhadap proses politik di Indonesia. Penting untuk memahami bahwa kebebasan berbicara dan perspektif yang beragam adalah fondasi dari demokrasi yang sehat dan harus dilindungi serta dihormati oleh semua pihak.

Insiden matinya mikrofon yang terjadi saat anggota fraksi Demokrat sedang menyampaikan keberatan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi sorotan utama di media sosial. Para warganet ramai membahas dan mengkritik tindakan tersebut, yang dianggap sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap Omnibus Law.

Dampak dari insiden ini adalah munculnya kata kunci 'Puan' sebagai trending topic di Indonesia. Salah seorang warganet dengan akun @FelixNate berpendapat bahwa matinya mikrofon ini adalah cara DPR dan pemerintah untuk menghentikan kritik terhadap Omnibus Law.

Pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober menjadi perhatian publik. Selain adanya perdebatan antara pimpinan rapat dengan Partai Demokrat yang menolak pengesahan Ciptaker, rapat tersebut juga diwarnai dengan insiden matinya mikrofon.

Warganet menduga bahwa Ketua DPR Puan Maharani terlibat dalam matinya mikrofon yang digunakan oleh anggota Fraksi Demokrat saat menyampaikan pendapat mereka dalam rapat paripurna yang memanas.

Kejadian ini terlihat saat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, yang memimpin rapat, berkomunikasi dengan Puan yang duduk di sebelahnya. Kemudian, Puan terlihat mengarahkan tangannya ke meja di depannya, dan secara tiba-tiba mikrofon yang digunakan oleh Irwan, anggota Demokrat yang sedang berbicara, mati.

Akun @jatamnas atau Jaringan Advokasi Tambang mengungkapkan bahwa suami Puan, Hapsoro Sukmonohadi, adalah seorang pebisnis di sektor minyak dan gas bumi. Hapsoro menjabat sebagai Komisaris PT Triguna Internusa Pratama, anak perusahaan PT Rukun Raharja Tbk yang bergerak di bidang jasa pertambangan.

Selain kata kunci 'Puan', beberapa tagar dan kata kunci terkait pengesahan Omnibus Law juga menjadi trending topic di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah #MosiTidakPercaya, #dprpenghianat, 'DPR RI GAGAL', 'Dewan Perwakilan Rakyat', dan 'Demokrat'.

Tagar #MosiTidakPercaya bahkan berhasil masuk dalam daftar trending topic dunia. Saat ini, tagar tersebut masih menjadi trending topic teratas di Indonesia dengan jumlah cuitan mencapai 1,7 juta.

Beberapa warganet membagikan pandangan mereka mengenai konsekuensi dari pengesahan Omnibus Law Ciptaker jika diberlakukan di Indonesia. Dalam diskusi ini, warganet juga membagikan video perdebatan antara Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan anggota fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.

Selain itu, kata kunci 'DPR RI Gagal' juga menjadi topik panas di Twitter dengan jumlah cuitan mencapai 83 ribu. Warganet menyoroti salah satu dampak dari pengesahan Ciptaker, yaitu hilangnya kompensasi bagi tenaga kerja wanita yang mengalami cuti haid, melahirkan, atau keguguran.

Diskusi dan kritik yang muncul di media sosial mencerminkan kepedulian warganet terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja, lingkungan, dan kepentingan

masyarakat. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang juga menjadi sorotan warganet. Mereka menuntut agar setiap keputusan yang diambil oleh DPR didasarkan pada pertimbangan yang jelas, obyektif, dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu peneliti ingin meneliti unggahan *Instagram* dari akun @kajianbinjai yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2022 mengenai puan yang mematikan mikrofon yang juga menimbulkan respon dari banyak orang, khususnya orang-orang yang menjadi *follower Instagram* dari akun @kajianbinjai.

Gambar 1.1.

Screenshot dari unggahan akun @kajianbinjai



(Sumber : Akun Instagram Kajian Binjai, 26 Mei 2022 : 12.57 WIB)

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberitaan Puan yang mematikan mikrofon terhadap sikap masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan *follower Instagram* dari akun @kajianbinjai yang memberikan *likes* pada unggahan *Instagram* dari akun @kajianbinjai yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2022 mengenai puan yang mematikan mikrofon.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, kemudian peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian yang adalah apakah terdapat pengaruh terpaan media Instagram dari akun @kajianbinjai yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2022 mengenai puan yang mematikan mikrofon terhadap sikap follower @kajianbinjai?.

1.3. Tujuan

Berdasarkan unggahan akun sosial media Instagram @kajianbinjai yang diunggah pada tanggal 26 mei 2022 yang melaporkan Puan mematikan mikrofon pada sidang paripurna sebagai data permasalahan, peneliti mempunyai tujuan untuk mengkaji isi unggahan yang menerpa para follower.

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti untuk dicapai pada penelitian ini yaitu, mengetahui pengaruh terpaan media Instagram dari akun @kajianbinjai yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2022 mengenai puan yang mematikan mikrofon terhadap sikap follower @kajianbinjai.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi untuk perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang kajian terpaan dan sikap audiens media.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan bagi masyarakat yang masih awam dengan perkembangan ilmu komunikasi khususnya terpaan dan sikap audiens media.